

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
MENINGKATKAN WAWASAN KEBANGSAAN GENERASI MUDA MELALUI
PROGRAM PASKIBRAKA DI PROVINSI NTB**

Hannatun Nisa¹, Igatun Haniah², Hijrianti³, Baiq Syakila Dwi Satria⁴, Al Humaira Tsaniatul Fallah⁵, Yolanda Alfira Febriana⁶, Bagdawansyah⁷, Selamat Riadi⁸

PPKn FKIP Universitas Mataram

¹hannatun06@gmail.com, ²igatunhaniah@gmail.com, ³hijrianti2005@gmail.com,

⁴bqsyakilad@gmail.com, ⁵alhumairahtsania@gmail.com,

⁶yolandayoland11@gmail.com, ⁷igatunhaniah@gmail.com,

⁸bqsyakilad@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out the role of the National Unity and Politics Agency in enhancing young people's national awareness through the Paskibraka program in NTB Province. This research uses a qualitative descriptive method with data collection through interviews, observations, and documentation. The research subject is one of the employees in Bakesbangpol's Iwasbang Division. The results show that Bakesbangpol plays a role in organizing the Paskibraka Program, from planning to mentoring the Purna Paskibraka. The program is carried out through a systematic selection process and serves as a means of instilling the values of Pancasila, nationalism, discipline, and leadership. The challenges faced include limited internet access and budget, but these are managed through schedule adjustments for recruitment and accompanying visits to the regions. Thus, the Paskibraka Program has proven effective in increasing young people's national awareness in West Nusa Tenggara Province.

Keywords: Bakesbangpol 1, Paskibraka 2, national insight 3, young generation 4.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dalam meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda melalui program paskibraka di provinsi NTB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitiannya yaitu salah satu karyawan di Bakesbangpol Bidang Iwasbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bakesbangpol dalam penyelenggaraan Program Paskibraka mulai dari perencanaan hingga pembinaan Purna Paskibraka. Program ini dilaksanakan melalui tahapan seleksi yang sistematis dan menjadi sarana penanaman nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, disiplin, serta kepemimpinan. Kendala yang dihadapi berupa keterbatasan jaringan internet dan

anggaran, namun diatasi melalui penyesuaian jadwal rekrutmen dan pendampingan ke daerah. Dengan demikian, Program Paskibraka terbukti efektif dalam meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kata Kunci: Bakesbangpol 1, Paskibraka 2, wawasan kebangsaan 3, generasi muda 4.

A. Pendahuluan

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa (Sofyan & Sundawa, 2025). Hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat nasional (Sofyan & Sundawa, 2025). Wawasan kebangsaan merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penguatan wawasan kebangsaan sangat penting di era globalisasi, mengingat generasi muda kini dihadapkan pada berbagai pengaruh budaya asing, perkembangan teknologi informasi, dan arus media sosial yang dapat

memengaruhi identitas nasional serta rasa cinta tanah air. Hal ini sejalan dengan pendapat(Purnama I., 2023) yang mengatakan bahwa globalisasi dan kemajuan media digital memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Penguatan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda kini menjadi semakin mendesak. Hal ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi dan media sosial yang dapat memberikan efek positif maupun negatif terhadap sikap kebangsaan. Tanpa adanya pendidikan dan pembinaan yang tepat, generasi muda berisiko kehilangan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan identitas nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk

menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara kontekstual dan menarik bagi generasi muda (Ramadanti, A.Z., 2022). Penanaman nilai kebangsaan tidak hanya dapat dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, tetapi juga perlu dilakukan melalui berbagai program pembinaan pemuda yang melibatkan pengalaman langsung, kedisiplinan, kepemimpinan, dan pengabdian kepada negara (Asan et al., 2025).

Salah satu program yang memiliki potensi besar dalam pembentukan karakter kebangsaan pada generasi muda adalah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyiapkan petugas pengibar bendera dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk membentuk karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan tanggung jawab, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada para anggotanya. Melalui serangkaian proses seleksi, pelatihan, pembinaan, dan pengabdian, diharapkan peserta Paskibraka dapat menjadi teladan bagi generasi muda lainnya dalam mengimplementasikan

nilai-nilai nasionalisme dan persatuan (Risma Yuliana Saputri & Fatma Ulfatun Najicha, 2023). Hal ini menjadi bukti bahwa program ini sangat mampu meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda di tengah derasnya arus globalisasi saat ini.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki peran yang sangat penting dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung wawasan kebangsaan, salah satunya melalui pembinaan Paskibraka. Sebagai lembaga daerah yang mengurus masalah kesatuan bangsa dan politik, Bakesbangpol bertanggung jawab untuk mengembangkan program-program yang bertujuan memperkuat persatuan nasional, meningkatkan kesadaran akan identitas bangsa dan negara, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Vikri & Djohan, 2021). Melalui program Paskibraka, Bakesbangpol tidak hanya melakukan seleksi peserta, tetapi juga mengadakan pembinaan yang

mencakup aspek ideologi, karakter, dan kepemimpinan.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), program Paskibraka berperan sebagai salah satu sarana strategis dalam membangun wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda. Dengan keragaman sosial dan budaya yang ada, provinsi NTB perlu memperkuat nilai-nilai persatuan agar tetap terjaga dalam konteks kebangsaan. Melalui pembinaan yang dilakukan oleh Paskibraka, diharapkan dapat tercipta generasi muda yang memiliki semangat nasionalisme, disiplin, dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, pelaksanaan program Paskibraka tetap menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah perubahan pola pikir generasi muda yang dipengaruhi oleh media sosial, keterbatasan sumber daya, perbedaan latar belakang peserta, serta dinamika dalam pelaksanaan program, yang dapat berdampak pada efektivitas pembinaan wawasan kebangsaan. Salah satu tantangan yang paling berat yaitu pengaruh media sosial, karena media sosial dapat menggeser

moral dan pola pikir generasi muda melalui konten-konten negatif, sehingga menyebabkan mereka kurang tertarik pada program paskibraka ini. Namun, menurut (Ramadanti, A.Z., 2022) pengaruh media sosial terhadap wawasan kebangsaan menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung pada tingkat literasi dan pembinaan yang diperoleh oleh generasi muda.

Berbagai Penelitian terdahulu umumnya membahas penguatan wawasan kebangsaan melalui pendidikan kewarganegaraan, media sosial, komunitas, atau kegiatan literasi kebangsaan. Namun, penelitian mengenai peran dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan wawasan kebangsaan melalui program Paskibraka, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih terbilang terbatas. Selain itu, masih sedikit penelitian yang secara mendalam mengkaji bagaimana pelaksanaan program Paskibraka dapat dijadikan instrumen untuk membina wawasan kebangsaan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang

dihadapi oleh Bakesbangpol dalam proses implementasinya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda melalui program Paskibraka. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Bakesbangpol, pelaksanaan program Paskibraka sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan program Paskibraka, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program tersebut. Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pembinaan wawasan kebangsaan generasi muda di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik dalam meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda melalui program paskibraka di provinsi NTB. Menurut (Toenlloe, 2021:12) Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara mendalam suatu fenomena berdasarkan data berupa kata-kata, tindakan, dan narasi subjek penelitian, tanpa menggunakan prosedur statistik, tetapi melalui analisis interpretatif dan naratif. Penelitian dilakukan di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB, khususnya pada bidang Iwasbang (Idiologi dan Wawasan Kebangsaan), karena bidang tersebutlah yang mengatur jalannya program paskibraka di daerah Provinsi NTB.

Data dikumpulkan dengan tiga metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali secara mendalam terkait peran kesbangpol dalam meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda melalui program paskibraka, selain itu juga untuk mengetahui secara mendalam tahapan-tahapan dari seleksi sampai pengumuman anggota paskibraka

dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program paskibraka, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun observasi dilakukan bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program paskibraka, serta berbagai fenomena yang berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Instrumen penelitian berupa alat tulis, pedoman wawancara dan Handpone untuk dokumentasi.

Melalui penerapan pendekatan dan metode penelitian yang tepat, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta temuan yang valid mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda melalui Program Paskibraka di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Generasi

Muda Melalui Program Paskibraka

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu salah satu karyawan Kesbangpol di bidang Iwasbang, menjelaskan bahwa sejak diterbitkannya peraturan presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), pengelolaan program Paskibraka secara nasional berada dibawah koordinasi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Di Tingkat daerah Bakesbangpoldagri berperan sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Pakibraka. Selain itu, Kesbangpol juga menjadi jalur pemerintah pusat dalam melaksanakan seluruh rangkaian program yang telah diatur dalam peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Peran tersebut dimulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, rekrutmen, seleksi, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan tugas pengibaran bendera, hingga pembinaan anggota purna Paskibraka.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran Bakesbangpol tidak terbatas sebagai fungsi administratif, tetapi juga mengatur dan mengawasi seluruh tahapan seleksi supaya terlaksana dengan efektif dan efisien. Hal ini didukung oleh pendapatnya (Romandani, A. W.,dkk, 2026) bahwa Bakesbangpol menjalankan peran sebagai koordinator utama yang bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengawasi seluruh tahapan seleksi agar terlaksana secara sistematis, objektif, transparan, serta sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan oleh BPIP. Selain itu, peran Bakesbangpol sebagai pembina wawasan kebangsaan. Peran tersebut sesuai dengan fungsi Bakesbangpol di bidang politik dan kesatuan bangsa, khususnya dalam membina ideologi Pancasila sekaligus membentuk karakter kebangsaan masyarakat.

Melalui proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari tahap seleksi hingga pembekalan Purna Paskibraka, program ini

menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri generasi muda.

2. Tahapan pelaksanaan program Paskibraka sebagai sarana peningkatan wawasan kebangsaan pada generasi muda

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Program Paskibraka di Provinsi NTB telah mengikuti pedoman nasional yang ditetapkan BPIP. Dimana seluruh proses dilaksanakan secara sistematis melalui aplikasi **Transparansi Paskibraka**, sehingga seluruh tahapan seleksi dapat dipantau secara terbuka. Aplikasi Transparansi Paskibraka adalah sistem informasi digital yang dikembangkan oleh BPIP untuk mendukung proses rekrutmen dan seleksi calon Paskibraka secara objektif, terbuka, akuntabel, serta terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia (Sumbala, Y. S. Y., Juhri, J., & Siswoyo, S., 2025). Adapun tahapannya sebagai berikut:

1) Sosialisasi Program

Pelaksanaan Program Paskibraka diawali dengan kegiatan sosialisasi dan rekrutmen yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil wawancara, proses seleksi pada tahap awal menjadi tanggung jawab Bakesbangpol kabupaten/kota dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku secara nasional sesuai pedoman yang ditetapkan oleh BPIP.

Sosialisasi dilakukan di SMA/SMK sederajat dengan sasaran utama peserta didik kelas X (kelas 1). Penetapan sasaran tersebut didasarkan pada ketentuan bahwa calon peserta Paskibraka harus berusia minimal 16 tahun dan maksimal 18 tahun pada saat pelaksanaan tugas pengibaran bendera serta masih berada di kelas X. Ketentuan ini diberlakukan karena masa

tugas anggota Paskibraka berlangsung selama satu tahun, sehingga peserta tidak hanya bertugas pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan kenegaraan lainnya, seperti Upacara Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun berikutnya. Oleh karena itu, peserta yang telah berada di kelas XI tidak diperkenankan mengikuti seleksi karena pada masa tugasnya mereka akan memasuki kelas XII yang memiliki beban akademik lebih tinggi.

- 2) Pendaftaran secara daring
Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Transparansi Paskibraka yang disediakan oleh BPIP. Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memudahkan pendataan peserta. Melalui aplikasi

tersebut, setiap peserta dapat melakukan pendaftaran secara mandiri sekaligus memantau hasil nilai yang diperoleh pada setiap tahapan seleksi. Namun, peserta hanya dapat melihat nilai miliknya sendiri dan tidak dapat mengakses nilai peserta lain. Sistem ini diterapkan untuk menjaga kerahasiaan data peserta sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi Paskibraka.

3) Seleksi administrasi

Setelah pendaftaran dibuka, peserta diberikan waktu tertentu untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi melalui aplikasi. Berdasarkan hasil wawancara, jangka waktu pendaftaran disesuaikan dengan kebijakan masing-masing kabupaten/kota, dengan durasi minimal antara 14 hingga 16 hari agar peserta memiliki waktu yang cukup untuk

memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Tahap berikutnya adalah seleksi administrasi yang bertujuan untuk memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen peserta. Persyaratan administrasi meliputi surat persetujuan dari sekolah, kartu keluarga, serta formulir pemeriksaan kesehatan yang harus diisi dan dibawa peserta saat menjalani pemeriksaan awal di fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan pada tahap ini masih bersifat awal (skrining) dan berbeda dengan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada tingkat provinsi, yang memiliki standar pemeriksaan lebih mendalam. Peserta yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi berhak melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.

4) Tes pendidikan Ideologi Pancasila (PIP)

Tes PIP ini berisi beberapa soal yang terdiri dari :

- a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
- b. Tes Intelegensi Umum (TIU)

Berdasarkan hasil wawancara, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menggunakan sistem gugur dengan nilai ambang batas (passing grade) nasional sebesar 70. Peserta yang memperoleh nilai di bawah standar tersebut secara otomatis dinyatakan tidak lolos dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Sementara itu, Tes Intelegensi Umum (TIU) menggunakan sistem pemeringkatan (ranking). Meskipun standar nilai yang ditetapkan adalah 70, pemerintah kabupaten/kota memiliki

kewenangan untuk menyesuaikan standar tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Hasil tes ini menjadi salah satu komponen penilaian dalam menentukan peserta yang berhak melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.

Berdasarkan kedua tes tersebut, tes TWK menjadi salah satu tahapan penting karena menggunakan sistem gugur apabila peserta tidak mencapai nilai ambang batas nasional.

5) Tes Kesehatan dan Parade

Tahap ini bertujuan memastikan peserta memenuhi persyaratan kesehatan dan postur tubuh sesuai standar nasional. Pada tingkat kabupaten/kota, kedua tes ini umumnya dilaksanakan pada hari yang sama, meskipun waktu pelaksanaannya dapat

disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah. Tes parade bertujuan untuk menilai kesesuaian postur dan kondisi fisik peserta dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPIP. Aspek yang dinilai meliputi tinggi dan berat badan, proporsi tubuh, serta kondisi fisik tertentu, seperti bentuk kaki (misalnya *X-band* atau *knock knees* dan *flat foot*), yang menjadi salah satu persyaratan dalam seleksi calon anggota Paskibraka.

Sementara itu, tes kesehatan merupakan tahapan seleksi yang menggunakan sistem gugur karena berkaitan dengan kondisi kesehatan peserta secara umum. Pada tingkat kabupaten/kota, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan masih bersifat pemeriksaan awal (*skrining*) untuk memastikan bahwa peserta memenuhi persyaratan dasar kesehatan sebelum

mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Pemeriksaan kesehatan yang lebih mendalam akan dilaksanakan pada tahapan seleksi di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) Tes Peraturan Baris Berbaris (PBB)

Setelah dinyatakan lulus pada tahap tes kesehatan dan parade, peserta mengikuti Tes Peraturan Baris Berbaris (PBB). Tahapan ini menggunakan sistem pemeringkatan (*ranking*), di mana peserta dinilai berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan gerakan dasar baris-berbaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek yang dinilai meliputi ketepatan gerakan, seperti hadap kanan, hadap kiri, dan gerakan dasar lainnya, serta ketegasan dan kualitas vokal saat memberikan aba-aba. Selain mengukur

keterampilan baris-berbaris, tes ini juga bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam memimpin barisan, sehingga dapat mencerminkan sikap disiplin, kepemimpinan, dan tanggung jawab sebagai calon anggota Paskibraka.

7) Tes Kesamaptaan

Tes kesamaptaan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani peserta. Tes ini terdiri atas beberapa komponen, yaitu lari selama 12 menit, *shuttle run*, *push up*, *sit up*, dan *back up*. Setiap komponen memiliki nilai dan standar minimal yang harus dipenuhi oleh peserta. Penilaian pada tahap ini menggunakan sistem pemeringkatan sehingga hasil yang diperoleh akan diakumulasikan bersama nilai pada tahapan seleksi lainnya untuk menentukan peringkat peserta.

8) Tes Wawancara

Tahap akhir dalam proses seleksi adalah tes wawancara, yang bertujuan untuk menggali kepribadian, minat, bakat, serta kondisi psikologis peserta. Penilaian tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik, tetapi juga pada karakter, integritas, dan kesiapan mental peserta sebagai calon anggota Paskibraka. Dalam pelaksanaannya, Bakesbangpol melibatkan tim psikolog untuk melakukan penilaian terhadap aspek psikologis peserta secara profesional.

Selain itu, tim seleksi terdiri atas berbagai unsur, yaitu Bakesbangpol, TNI/Polri, Duta Purna Paskibraka Indonesia (DPPI), tenaga kesehatan, dan psikolog. Keterlibatan berbagai unsur tersebut bertujuan untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas selama proses seleksi. Seluruh nilai peserta diinput melalui aplikasi Transparansi

Paskibraka, sehingga proses penilaian dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi.

Selain hasil tes, rekam jejak digital peserta di media sosial juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses seleksi. Aktivitas peserta di media sosial dinilai untuk memastikan bahwa calon anggota Paskibraka memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, etika, dan wawasan kebangsaan. Setelah seluruh tahapan seleksi selesai, sistem aplikasi secara otomatis menyusun peringkat peserta berdasarkan akumulasi nilai yang diperoleh. Namun, hasil tersebut belum dapat diumumkan secara langsung karena mekanisme pengumuman dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, dan terakhir tingkat kabupaten/kota. Di

Provinsi Nusa Tenggara Barat, setiap kabupaten/kota

mengirimkan empat peserta terbaik, terdiri atas dua putra dan dua putri dengan peringkat tertinggi, untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi

Berdasarkan seluruh tahapan-tahapan tersebut merupakan bagian dari proses pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Mulai dari sosialisasi sampai ke wawancara, dimana setiap tahapannya dirancang bukan hanya untuk menyeleksi peserta, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab dan kepemimpinan. Oleh karena itu, Program Paskibraka menjadi sarana yang efektif dalam membentuk karakter generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan serta komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Dihadapi

Bakesbangpol dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda Melalui Program Paskibraka

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Program Paskibraka di Provinsi NTB menghadapi beberapa tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Salah satu faktor penghambat adalah keterbatasan jaringan internet, mengingat proses pendaftaran dan seleksi telah menggunakan sistem daring melalui aplikasi Transparansi Paskibraka. Penerapan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Program Paskibraka (Khayati, I.N., & Prathama, A., 2024). Kondisi jaringan yang kurang stabil di beberapa daerah berpotensi menghambat proses pendaftaran peserta. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala, terutama dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi kabupaten/kota. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua daerah dapat mengikuti kegiatan tersebut secara langsung, sehingga

berpotensi memengaruhi koordinasi dan penyamaan pemahaman dalam pelaksanaan Program Paskibraka.

Meskipun demikian, Bakesbangpol melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam mengatasi permasalahan jaringan internet, Bakesbangpol memberikan kewenangan kepada masing-masing kabupaten/kota untuk menyesuaikan jadwal rekrutmen dengan kondisi daerah masing-masing. Sementara itu, untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Bakesbangpol melakukan kunjungan langsung ke kabupaten/kota yang tidak dapat mengikuti Bimbingan Teknis, sehingga seluruh daerah tetap memperoleh informasi, pendampingan, dan pembinaan yang sama. Upaya-upaya tersebut menjadi faktor pendukung yang menunjukkan komitmen Bakesbangpol dalam memastikan Program Paskibraka tetap berjalan secara optimal sebagai sarana peningkatan wawasan kebangsaan generasi muda.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bakesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat berperan penting dalam meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda melalui Program Paskibraka dengan melaksanakan perencanaan, sosialisasi, rekrutmen, seleksi, pelatihan, hingga pembinaan Purna Paskibraka. Program ini dilaksanakan secara sistematis sesuai pedoman BPIP dan tidak hanya berfungsi sebagai proses seleksi, tetapi juga sebagai sarana penanaman nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, disiplin, integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Meskipun menghadapi kendala berupa keterbatasan jaringan internet dan anggaran, Bakesbangpol melakukan berbagai upaya, seperti penyesuaian jadwal rekrutmen dan pendampingan ke daerah, sehingga Program Paskibraka tetap efektif sebagai sarana pembentukan karakter dan peningkatan wawasan kebangsaan generasi muda di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Romandani, A. W., Dewi, S. K., Zulfyani, N., Ummah, S. K., & Wahono, M. (2026). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Semarang. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(02), 225-241.
- Toenlio, A. J. (2021). *Pendekatan penelitian kualitatif bidang pendidikan*. Malang: Ahmedia Press. (hlm. 12). www.ahlimediapress.com
- Asan, K., Ramadhani, R., Pasaribu, R., & Iwan, J. P. (2025). *Menanamkan Nilai Kebangsaan Untuk Di Lingkungan Sekolah*. 3(01), 53–60. <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/abdimas>
- Purnama I., D. (2023). Urgensi Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Z Di Tengah Derasnya Arus Global. *Civilia*, 3. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Ramadanti, A.Z., A. al. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan*

- Pancasila Dan*
Kewarganegaraan, 9(2), 1.
<https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.4773>
- Dalam Proses Seleksi Paskibraka
Di Kabupaten Tanggamus. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 262-269.
- Risma Yuliana Saputri, & Fatma Ulfatun Najicha. (2023). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dan Penanaman Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda. *Jurnal Rontal Keilmuan PKN*, 9(1), 1–6.
- Khayati, I.N., & Prathama, A. (2024). Peran Bakesbangpol Dalam Pembinaan Kegiatan Paskibraka Di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*.
- Sofyan, F. S., & Sundawa, D. (2025). Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2), 185–199.
- Vikri, A., & Djohan, D. (2021). *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda di Kota Jambi*. <http://eprints.ipdn.ac.id/22944/0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/22944/1/3> Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda di Kota Jambi.pdf
- Sumbala, Y. S. Y., Juhri, J., & Siswoyo, S. (2025). Penggunaan Aplikasi Transparansi Paskibraka